

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sejak masuknya Orde Reformasi pada tahun 1998 dan disahkannya undang-undang tentang desentralisasi sebagai awal dari lepasnya masa Orde Baru, pemerintahan di daerah-daerah kembali memberikan ruang kepada para elit-elit lokal untuk berkuasa. Hal tersebut merupakan sebuah kesempatan emas bagi para elit lokal untuk kembali mendominasi kekuasaan ditingkat lokal karena sebelumnya para elit lokal merasa terkekang dengan sistem pemerintahan yang sentralistik dibawah rezim otoriter Soeharto. Keberhasilan reformasi melengserkan rezim orde baru yang diawali dengan pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan seiring dengan berjalannya waktu Undang-undang No 32 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah telah disahkan sehingga menjadi cikal bakal pemerintahan di berbagai daerah kembali ketangan para elit-elit lokal seperti keturunan raja-raja, keturunan bangsawan dan sebagainya.

Fenomena politik lokal yang didominasi oleh kalangan elit lokal merupakan sebuah fenomena politik yang melibatkan keikutsertaan keluarga seperti anak, istri, suami dan kerabat lainnya didalam ranah politik baik dalam pemilukada, pemilihan legislatif maupun dalam penempatan posisi jabatan lainnya (Purwaningsih, 2015). Dominasi kekuasaan ditingkat lokal oleh para elit-elit lokal hampir terdapat di berbagai wilayah di Indonesia, dapat dilihat para elit lokal yang kembali berkuasa di daerah-daerah seperti keluarga politik Ratu Atut

Choisiyah di Banten, Abdullah Tuasikal di Maluku, Fadeli di Lamongan, Sjahroeddin di Lampung, Zulkifli di Jambi, Sutrisno di Kediri dan di beberapa daerah lain yang tersebar diseluruh Indonesia (Haryanto, 2014).

Salah satu daerah yang didominasi oleh suatu klan yaitu di Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Polewali Mandar. Sebenarnya ada tiga klan yang mendominasi kekuasaan di Mandar yaitu Klan Manggabarani, Klan Mengga dan Klan Masdar, dan sampai saat ini sudah ada beberapa studi yang membahas ketiga klan tersebut. Di dalam setiap kontestasi politik di Sulawesi Barat ketiga klan tersebut selalu ikut untuk berkontestasi baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Namun dalam tulisan ini lebih berfokus kepada salah satu klan yaitu Klan Masdar. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan istilah politik klan. Istilah ini digunakan untuk mengartikan bagaimana keluarga menghadirkan kekuasaan (Haryanto, 2014).

Berawal sejak terbentuknya daerah tingkat II yaitu Kabupaten Polewali Mamasa pada saat itu yang selanjutnya pada tahun 2005 terbagi menjadi dua yakni Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar, Klan Masdar mulai menduduki jabatan sebagai Bupati Polewali Mamasa pada tahun 1995 yaitu Kol. H. Andi Saad Pasilong yang kemudian terus berkembang hingga saat ini. Berikut ini adalah daftar nama Klan di Sulawesi Barat beserta jabatannya.

Tabel 1.1

Fenomena Klan di Sulawesi Barat

No	Klan Politik	Nama/Hubungan Keluarga	Jabatan
1	Masdar	- Kol. H. Andi Pasillong/Ipar Masdar Pasmr H.	- Bupati Polewali Mamasa (1995-1998)
		- H. Masdar Pasmr	- Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mamasa (1995-2000) - Ketua DPD Golkar Kabupaten Polewali Mamasa (1995-2000)
		- Ali Baal Masdar/anak H. Masdar Pasmr	- Bupati Polewali Mandar dua periode (2004-2014) - Gubernur Sulawesi Barat (2017-2022)
		- Ibrahim Masdar/anak H. Masdar Pasmr	- Bupati Polewali Mandar (2014-2018) - Bupati terpilih (2018-2023) - Ketua DPD Golkar (2005-2009)
		- Andi Ruskati Ali Baal/istri Ali Baal Masdar	- Anggota DPR-RI (2014-2019) - Ketua DPD Gerindra Sulawesi Barat
2	S. Mengga	- Kol.(Purn) S. Mengga	- Bupati Polmas (1980-1990)
		- Kol. Purn Mayjen Salim S. Mengga/Anak S. Mengga	- Anggota DPR RI (2009-2014) - Anggota DPR RI (2014-2017) - Caleg DPR RI 2019-2024
		- Aladin S. Mengga/Anak S. Mengga	- Wakil Gubernur Sulawesi Barat (2012-2017) - Ketua Dewan Pembina PDI-Perjuangan Sulawesi Barat
		- Erfan Kamil Salim S. Mengga/Cucu S. Mengga	- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat (2009-2014)

			- Ketua DPC Parta Demokrat Polewali Mandar
3	Manggabarani	- H. Andi Hasan Mangga/Anak Andi Bilu Manggabarani	- Bupati Polmas (1960-1966)
		- Kol. H. Hasyim Manggabarani, SH. MM/Anak Andi Hasan Manggabarani	- Bupati Polmas (1998-2003)

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di Sulawesi Barat juga terdapat politik klan yang didominasi tiga klan yaitu Klan Manggabarani, Klan Mengga dan Klan Masdar. Selanjutnya penulis lebih berfokus kepada salahsatu klan yaitu klan Masdar. Klan Masdar saat ini dapat dikatakan yang terunggul dari ketiga klan di Sulawesi Barat dimana yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat yakni dari Klan Masdar yaitu Ali Baal Masdar dan adiknya, Andi Ibrahim Masdar juga merupakan Bupati Polewali Mandar yang baru terpilih pada pilkada serentak 2018 untuk periode kedua.

Pada tabel fenomena klan di Sulawesi Barat di atas, dapat kita amati bagaiman persaingan ke tiga klan berlangsung, hingga saat ini persaingan klan di dominasi oleh Klan Masdar dan Klan Mengga. Terpilihnya Ali Baal Masdar (Klan Masdar) pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 merupakan sebuah kemenangan mengalahkan Salim Mengga (Klan Mengga) yang sebelumnya pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2012 Ali Baal Masdar di kalahkan oleh pasangan Anwar Adnan Saleh dan Aladin S. Mengga (Klan Mengga). Dari persaingan tersebut sehingga penelitian ini bermaksud untuk menganalisis modal yang sangat berperan dalam kemenangan Klan Masdar. Bagaimana modal

tersebut mampu bekerja sehingga dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 kemenangan dapat diraih oleh Klan Masdar.

Tabel 1.2

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung/Pendukung	Suara
1	Suhardi Duka dan Kalma Katta	- Partai Demokrat - Partai Hati Nurani Rakyat - Partai Keadilan Sejahtera	240.010 (38.01%)
2	Salim S. Mengga dan Hasanuddin Mas'ud	- Partai Golongan Karya	146.774 (23.24%)
3	Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeny Anwar	- Partai Gerakan Indonesia Raya - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Nasional Demokrat - Partai Amanat Nasional - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan - Partai Persatuan Pembangunan - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	244.763 (38.76%)
Jumlah			631.547 (100.00%)

Sumber: KPU RI

Dukungan partai politik dan perolehan suara terlihat begitu signifikan dibandingkan pada pemilihan gubernur tahun 2012, dimana Ali Baal Masdar hanya didukung oleh tiga partai politik yaitu Parta Gerindra, PDK dan PNI Marhaenisme dengan perolehan suara 198.679.

Kemenangan pasangan Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeny Anwar merupakan sebuah kemenangan yang tidak diperoleh begitu saja. Untuk

memperoleh capaian kemenangan maka juga dibutuhkan beberapa modal seperti modal kultural (pengetahuan, kualifikasi pendidikan, gelar akademik dan bahasa), modal sosial (berbagai jenis relasi dan jaringan), modal simbolik (prestise, kehormatan dan kharisma) dan modal ekonomi (kekayaan, uang, properti). (Pierre Bourdieu, 1986), dan beberapa ahli yang lain menambahkan modalitas dalam konteks pemilu yaitu modal politik (Ancok, 2003).

Modal politik merupakan dukungan yang diperoleh dari partai politik gabungan beberapa partai politik terhadap bakal calon yang akan di usung pada pemilihan umum kepala daerah. Modal ekonomi atau yang sering juga disebut modal finansial, yaitu dukungan berupa harta kekayaan dalam bentuk harta benda seperti uang yang akan menjadi penopang dalam mendanai politik bakal calon, (*cost politik*) biaya politik. Sementara modal sosial merupakan modal kedekatan bakal calon terhadap individu atau kelompok masyarakat yang akan memilih sebagai bentuk partisipasi politik untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum kepala daerah. Dalam penelitian ini, modal sosial dan modal politik merupakan modal yang akan diperdalam sebab modal tersebut yang dianggap paling berperan dalam kemenangan Klan Masdar pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

Kepemilikan modal sosial – politik ABM pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 berupa jaringan birokrasi, kepercayaan masyarakat, ketokohan (modal sosial) dan dukungan partai politik, pasangan wakil, pengalaman politik, dukungan relawan (modal politik) merupakan modal yang sangat mempengaruhi kemenangannya. Dapat kita lihat bahwa pada kontestasi

pemilihan gubernur tahun 2012, kepemilikan modal sosial - politik masih sangat sederhana sehingga memungkinkan pada kontestasi itu ABM belum mampu memperoleh kemenangan. Pada tahun 2012 dalam kontestasi pemilihan gubernur Sulawesi Barat, ABM belum selesai dalam jabatan sebagai bupati Polewali Mandar periode yang ke dua sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk memberikan dukungan, sedangkan pada tahun 2017 setelah selesai menjabat sebagai bupati Polewali Mandar dua periode yang pada posisi jabatan bupati selanjutnya di duduki oleh adiknya (Andi Ibrahim Masdar) serta pada beberapa instansi pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar juga diisi oleh beberapa anggota klan-nya sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan berupa jaringan birokrasi, kepercayaan masyarakat-pun secara langsung didapatkan karena dianggap mampu setelah menjabat sebagai bupati dua periode, dengan sendirinya ketokohan ABM semakin menguat khususnya dikalangan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2012 dimana ABM hanya di dukung oleh tiga parta politik yang notabene pada saat itu jumlah parpol lebih banyak dibandingkan dengan pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 ABM justru di dukung oleh tujuh partai politik. Pasangan wakil yang digandengkan dengan ABM juga memberikan pengaruh, yaitu figur Enny Anggraeni Anwar, selain sebagai Anggota DPR-RI dirinya juga merupakan istri manatan gubernur Sulawesi Barat dua periode yang tentunya masih memiliki pengaruh yang dalam istilah marketing politik dikenal dengan istilah *Influencer*. Sementara pengalaman politik yang dimiliki ABM pada pemilihan gubernur 2017 lebih matang

dibandingkan pada pemilihan gubernur tahun 2012 hal itu karena rentan waktu yang dimanfaatkan jauh lebih lama. Dukungan relawan juga tentunya memberikan pengaruh yang sangat menentukan kemenangan, dengan strategi pemasaran politik baik dalam strategi *push marketing* berupa kunjungan langsung dengan konstituen maupun pemanfaatan media sosial sebagai sarana marketing atau strategi pemasaran politik berupa *pull marketing*. Lantas bagaimana dengan modal yang lain yaitu modal ekonomi, modal simbolik dan modal kultural? Antara kontestasi pemilihan gubernur tahun 2012 dan tahun 2017 tidak memiliki perbedaan yang begitu signifikan, itulah sebabnya maka modal sosial-politik merupakan modal yang lebih diperdalam karena merupakan modal yang paling berpengaruh terhadap kemenangan ABM pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

Melihat keberhasilan Klan Masdar dalam kemenangan pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 dengan perolehan suara yang cukup signifikan maka hal tersebut memunculkan beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, diantaranya adalah bagaimana modalitas Klan Masdar bekerja sehingga pada Pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 dapat dimenangkan? Bagaimana peran modalitas dalam pemasaran politik yang dilakukan oleh Klan Masdar pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul karena Klan Masdar merupakan klan yang sudah dianggap memiliki empat modalitas (politik, kultural, sosial dan ekonomi) namun pada pemilihan gubernur tahun 2012 dikalahkan oleh pasangan Anwar Adnan Saleh dan Aladin

S. Mengga, dan barulah memperoleh kemenangan pada Pemilihan gubernur tahun 2017.

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan diatas akan didapatkan dalam rumusan masalah.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disinggung pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peran Modal Sosial - Politik dalam pemasaran politik Klan Masdar pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun2017?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Modal Sosial-Politik dalam pemasaran politik Klan Masdar pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun2017

I.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini dapat dibagi kedalam dua manfaat yaitu:

a. Manfaat Akademis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu politik dan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat untuk pengembangan studi politik lokal terutama yang berkaitan dengan politik klan dan peran modal dalam pemasaran politik

2) Dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain terutama peneliti yang memiliki penelitian yang mirip dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumber informasi bahwa faktor kemenangan dalam sebuah kontestasi politik khususnya pemilihan umum kepala daerah tidak diperoleh dengan jalan pintas, melainkan butuh modalitas untuk mendukung kemenangan.

2) Bisa menjadi referensi bagi pelaku politik untuk mengetahui dan memahami modal yang dibutuhkan dalam berkontestasi politik.